

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat diambil suatu kesimpulan :

1. Pengelolaan BMN pada satker BLU PPSDM KEBTKE KESDM studi kasus pemindahtanganan barang hibah dari luar negeri sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, namun terdapat kendala dalam proses penatausahaan BMN karena merupakan kasus penerimaan barang hibah dari luar negeri yang pertama sehingga perlu kehati-hatian dalam pelaksanaannya;
2. Barang hibah yang diterima oleh satuan kerja BLU merupakan pendapatan BLU tanpa perlu melakukan pengesahan ke KPPN dan sesuai dengan PMK 202.PMK.05/2022 menyatakan bahwa Hibah Barang BLU tidak perlu disahkan secara pendapatan kepada KPPN karena tidak memerlukan registrasi Hibah;
3. Pencatatan Hibah Barang telah dilaksanakan dengan input data hibah pada modul asset jenis transaksi hibah masuk (103) dan modul persediaan jenis transaksi hibah masuk BLU (M12) pada aplikasi SAKTI;
4. Teori yang diambil peneliti pada kasus pemindahtanganan barang hibah dari luar negeri pada satker BLU PPSDM KEBTKE yaitu teori manajemen aset oleh Siregar (2004) dengan indikator manajemen aset meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA.

B. Saran

Untuk pelaksanaan pemindahtanganan BMN berupa barang hibah dari luar negeri pada satker BLU PPSDM KEBTKE di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi salah satu tantangan terutama dalam proses pencatatan pada aplikasi SAKTI karena merupakan jenis pengelolaan BMN pertama yang dilaksanakan oleh satker BLU PPSDM KEBTKE, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- a. Banyak melakukan koordinasi dengan pihak pengguna barang dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk menghindari kesalahan penginputan dan pelaporan pada aplikasi SAKTI;
- b. Analisis BMN mengikuti diklat atau bimtek terkait Pemndahtanganan Barang Milik Negara khususnya terkait pengelolaan Hibah BMN untuk menambah pengalaman dan pengetahuan;
- c. Menambah satu personil untuk jabatan Analisis Barang Milik Negara dalam rangka mempercepat pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peta Jabatan Unit Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalaistrkan dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Gima Sugiama (2013). *Manajemen Aset Pariwisata Bandung: Guardaya Intimarta*
- Ahsin Sidqi. 2020. *Powerful Asset Management Digitalisasi Pengelolaan Pembangkit*
- Amiri, K. (2015). *Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Secara Akuntabel Menuju Good Governance*
- Amiri, Kartika. (2016). *Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Secara Akuntabel Menuju Good Governance*. Potret Pemikiran Volume 20: Nomor 2
- Anwar Sulaiman. 2001. *Manajemen Aset Daerah*
- Ardian, Dyah. 2023. *Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Negara Melalui Proses Hibah Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah*
- Basuki. 2000. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Karya Tulis Widyaiswara Pundiklat Pegawai BPK
- Cris Kuntadi, 2022. *Literature Review: Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Aset*
- Downes, Jhon dan Jordan E Goodman. 1999. *Kamus istilah keuangan dan investasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Doli D. Siregar. (2004). *Manajemen Aset. Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Eko Hariyanto Gima Sugiama, Dyah Kusumastuti. *Pengertian Manajemen Aset dan Logistik serta Manajemen Rantai Pasokan*
- Enny Agustina. 2021. *Prinsip Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Menuju Good Governance*
- Griffin, 2004. *Manajemen*. alih bahasa Gina Gania, Erlangga, Jakarta
- Hariyono, Arik. 2007. *Prinsip & Teknik Manajemen Kekayaan Negara*
- Hariyanto, Eko Budi. 2018. *Strategic Assets Management: Fokus Pemanfaatan Aset Negara Dengan Pendekatan Resource Based View (RBV)*
- Hastings, Nicholas A.J. 2010. *Physical Asset Management*. Springer London
- Kasperskaya, Y. (2018). *Asset Management. Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy*

- Kholistiani, Sulistyani. 2017. Implementasi Manajemen Strategis dalam Pengelolaan Aset Negara: Studi Empiris pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri
- Mangkoesebroto, Guritno. 1993. Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE
- Mitchell., John S (2006). *Physical Aset Management Handbook*, CLARION, Technical, Boston
- Ramdany, R., & Setiawati, Y. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Negara (BMN). *Jurnal Akuntansi*, 1
- Saragih, A. E. 2017. Pengaruh *Intellectual Capital (Human Capital, Structural Capital Dan Customer Capital)* Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*. 3(1): 1-24
- Siregar, Doli D. 2002. Optimalisasi Pemberdayaan Aset Kekayaan Negara. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Sugiono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabet
- Siregar, D. D. (2004). "Manajemen Aset". Jakarta: Gramedia.
- Sri Wahyuni, Rifki Khoirudin. 2020. Pengantar Manajemen Aset.
- Sugiama, A. G. (2013). Manajemen Aset Pariwisata Bandung. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Sumini, R. (2020). Modul Pengelolaan Barang Milik Negara. Modul Pengelolaan Barang Milik Negara.
- Sutrisno. (2004). *an Investigation of Participation Project Appraisal in Developing Countries Using Elements of Value an Risk Management*. University of Manchester Institute, Volume 1.

Peraturan Perundang-undangan :

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Penelitian Keuangan Pemerintah Pusat
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum jo PP Nomor 74 Tahun 2012 dan Pasal 69 ayat (1) PMK 129/PMK.05/2020 jo PMK 202/PMK.05/2022, Hibah yang diterima oleh Satuan Kerja BLU adalah pendapatan BLU

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Dokumen-dokumen lainnya :

Agus Hermanto. 2007. Modul Prinsip dan Teknik Manajemen Kekayaan Negara

MOU antara KESDM RI & SECO tentang Kerjasama dalam Pengembangan Keterampilan di Sektor Energi Terbarukan tanggal 9 Oktober 2020

Penelitian SAKTI Modul Aset PPSDM KEBTKE TA 2022

Penelitian SAKTI Modul Persediaan PPSDM KEBTKE TA 2022

Penelitian SAKTI Modul GLP PPSDM KEBTKE TA 2022

Pengaturan Proyek (PA) antara BPSDM dengan SECO tentang Kerjasama dalam Pengembangan Keterampilan di Sektor Energi Terbarukan di Indonesia tanggal 2 Desember 2020

Ringkasan Hibah No. 154 K/KU.01.04/KPA/2021 Tanggal 22 September 2021